

PENGELOLAAN UTANG NEGARA DAN PEMULIHAN EKONOMI

Oleh:
Makmun¹

Abstract

The huge amount of the government debt consists of domestic debt (Surat Utang Negara – SUN), international bond and foreign debt. The domestic debt has reached Rp616 trillion while international bond US\$1.4 billion and foreign debt Rp74.661 trillion. The role of debt, especially foreign debt, in budget financing has reached 39.4% in 2002 and it predicted will decrease to 31.4% in 2004. Consequently, there is still heavy debt burden for the government.

There are 2 alternatives that government can do to overcome the debt problem. The first is developing bond market in order to build sustainability government debt structure, to decrease the dependence on foreign debt, and to support central bank effectiveness in implementing monetary policy. The second is to establish government debt management act in order to optimize the resources and fund allocation for domestic economy.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dalam perekonomian, mengatur redistribusi pendapatan dan kekayaan serta mempertahankan kesempatan kerja penuh (*full employment*)². Dengan demikian kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan masalah penerimaan negara, pengeluaran negara dan pinjaman negara serta pengelolaannya.

Suatu negara yang melakukan pinjaman ke luar negeri, permasalahan yang dihadapinya tidak hanya berhenti setelah mendapatkan pinjaman. Masalah lain yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dan bagaimana pengembalian pinjaman tersebut. Masalah ini mungkin tidak akan timbul bilamana negara secara finansial tidak mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, atau dengan kata lain pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa *debt service*. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, *debt service* merupakan pengeluaran devisa yang utama.

Persoalan yang dihadapi negara berkembang yang melakukan pinjaman luar negeri adalah bagaimana meminimalkan beban pinjaman tersebut, sehingga pembayaran pinjaman tidak mengganggu stabilitas perekonomian domestik. Pembayaran pinjaman luar negeri harus mampu menjamin anggaran negara mampu mendorong dan menggiatkan pembangunan ekonomi. Dengan demikian negara harus mampu mengelola pinjaman luar negeri sedekian rupa, sehingga pinjaman ini hanya

¹ Makmun adalah Peneliti Madya pada Bappeki, Depkeu.

² M. Suparmoko, 1980, Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara, Bagian Penerbit Fak. Ekonomi UGM, Yogyakarta.

sebagai pelengkap saja. Untuk meminimumkan beban pinjaman luar negeri, pemerintah harus mampu mengatur periode pembayaran terhadap bunga dan cicilan pokok utang, serta besarnya bunga dan cicilan pokok utang. Ini harus dipertimbangkan masak-masak sehingga pembayaran utang dan bunga ini tidak mengganggu stabilitas pembangunan ekonomi.

Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat tertentu, penerimaan total devisa, *gross capital inflow*, tabungan dalam negeri dan tersedianya *foreign exchange reserve* harus melebihi besarnya impor barang-barang dan jasa-jasa serta investasi domestik sebesar pembayaran jasa-jasa pinjaman.³ Jadi apabila perekonomian suatu negara harus melakukan pembayaran pada setiap tahun dengan suatu jumlah tertentu, maka jumlah output yang dihasilkan ditambah dengan *capital inflow* termasuk *net use of foreign exchange reserve*, harus melebihi konsumsi domestik serta investasi dengan jumlah sebesar pembayaran jasa-jasa pinjaman.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis profil utang pemerintah dan swasta.
2. Menganalisis bagaimana pengelolaan utang negara dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi.

1.3 Metodologi

Dalam analisis ini akan digunakan pendekatan analisis diskripsi. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang besar dari Bank Indonesia dan Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DP-SUN). Untuk melengkapi analisis, juga akan digunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti makalah ilmiah, majalah, surat kabar maupun sumber lainnya yang relevan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Manfaat Utang Luar Negeri⁴

Dampak utang luar negeri (LN) pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi banyak dipertanyakan orang. Dalam berbagai model analisis regresi, jarang ditemukan dampak positif utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan model tertentu, terlihat bahwa utang luar negeri justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, semakin urgen bagi pemerintah untuk meninjau kembali penggunaan utang LN beserta

³ Gerald M. Meier, 1965, *International Trade and Development*, A Harper International Student reprint, Harper and Row New York.

⁴ Pandangan tentang utang luar negeri secara lengkap dapat dilihat misalnya dalam Todaro (1983), H.W.Arndt (1991),

alokasinya⁵. Penelitian Umar Juoro menunjukkan faktor yang selalu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, adalah investasi dan keterbukaan ekonomi. Dalam berbagai model, dua faktor itu selalu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meski investasi memberikan dampak positif, tetapi ada dua jenis investasi yang tidak secara meyakinkan berdampak positif pada pertumbuhan. Dua jenis investasi itu adalah dana yang dialokasikan pada pengembangan sumber daya manusia dan investasi dengan penanaman modal asing (PMA). Namun kondisi di Indonesia, PMA memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pinjaman luar negeri menunjukkan hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sekalipun hasil dari penggunaan model tertentu ada juga yang membuktikan

dampak positif utang luar negeri.

Tidak hanya di Indonesia, perdebatan mengenai dampak utang luar negeri pada pertumbuhan ekonomi di berbagai negara pun sudah lama diperdebatkan. Berbagai studi empiris menunjukkan hubungan utang Luar Negeri terhadap pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif, meski sejumlah penelitian juga menolak kesimpulan itu. Namun demikian, karena utang luar negeri juga merupakan bagian dari investasi, seharusnya berdampak positif pada pertumbuhan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, bukan tujuan dasar atau substansi dari utang luar negeri tetapi lebih pada soal pengalokasiannya serta pemanfaatannya proporsional atau tidak.⁶

Seperti isu yang berkembang di masyarakat, yang menjadi persoalan adalah pengalokasian utang luar negeri. Terkadang kita menerima utang yang penggunaannya tidak kontinu atau penggunaannya sangat tergantung pada negara donor, terlepas dari kita butuh atau tidak jenis utang yang ditawarkan. Secara teoretis pada tahun 1950 dan 1960-an, dalam semangat duet ekonomi Harrod-Domar⁷, utang luar negeri dipandang mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran utang luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Secara teori, utang luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (*multiplier effects*) yang positif pada perekonomian. Namun pada tahun 1970-an, dua ekonomi lain yaitu: Keith Griffin dan John Enos dalam bukunya "*Foreign Assistance: Objectives and Consequences*" membuktikan utang luar negeri berdampak negatif pada pertumbuhan. Mereka mengajukan bukti empiris bahwa utang luar negeri berkorelasi negatif pada

⁵ Umar Juoro, "Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pinjaman Luar Negeri" yang disampaikan dalam kuliah umum di FE-UI, Depok, Selasa 28 Maret 1995.

⁶ Analisis tentang dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dapat pula dilihat dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Liviatan (1984), Sritua Arief (1998), Makmun Sya'dullah (1999).

⁷ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta, 1982, hal. 65

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Utang luar negeri telah membuat pemerintah meningkatkan pengeluaran yang mengurangi dorongan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sebagainya. Ekonom di era berikutnya juga melakukan studi yang mendukung kesimpulan Griffin dan rekannya⁸.

Selanjutnya muncul ekonom lainnya, yang menolak hipotesa tersebut dengan mengatakan utang luar negeri tidak terlihat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Karena negara yang menjadi obyek penelitian adalah yang berpendapatan per kapita sangat rendah. Ada juga ada ekonomi lain yang mengatakan sudah barang tentu utang luar negeri berdampak negatif, karena ada faktor nonekonomi yang mempengaruhi yakni adanya peperangan, gangguan politik, perubahan terms of trade hasil pertanian secara tiba-tiba disertai bencana alam. Faktor itulah yg luput dari penelitian para ekonom. Akan tetapi penelitian pada tahun 1988 oleh Rana dan Dowling, dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*, di negara-negara Asia, menunjukkan memang tidak ada kaitan yang berarti antara utang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tahun 1992 oleh ekonom Snyder juga menunjukkan sangat kecil dampak utang luar negeri pada pertumbuhan ekonomi. Perlu ditelaah kembali, mengingat besarnya utang luar negeri ke Indonesia, maka dengan hasil penelitian itu, sangat penting dipikirkan kembali pengelolaan utang luar negeri tersebut. Bukan hanya

hasil penelitian itu saja, yang menjadi alasan mengapa Indonesia perlu meninjau kembali penggunaan utang luar negeri. Dengan penelitian itu kita tidak perlu harus membenci utang luar negeri. Yang diperlukan adalah penelaahan kembali pengalokasian utang luar negeri. Lebih-lebih lagi adalah kenyataan bahwa kini jumlah utang luar negeri yang diterima sudah jauh lebih kecil dari pada yang harus dibayarkan kembali.

2.2 Pandangan Negatif Terhadap Utang Luar Negeri

Utang luar negeri yang disalurkan oleh pihak negara-negara maju ke negara-negara yang sedang berkembang tidaklah dilakukan atas dasar kemanusiaan, akan tetapi atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Utang luar negeri tidak akan disalurkan jikalau tidak ada keuntungan ekonomi untuk pihak pemberi utang⁹. Perkembangan-perkembangan pada 1080-an dan 1990-an yang menunjukkan situasi apa yang disebut krisis utang (*debt-crisis*) dapat dijadikan petunjuk untuk mendukung argumen ini.

Suatu pernyataan yang paling keras menganggap bahwa bantuan internasional yang diberikan sejak Perang Dunia II lebih banyak keburukannya daripada

⁸ Keith Griffin dan John Enos dalam maklah Umar Juoro, *Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pinjaman Luar Negeri*" yang disampaikan dalam kuliah umum di FE-UI, Depok, Selasa 28 Maret 1995

⁹ Teresa Hayter, *Aid as Imperialism*, Harmondsworth, Penguin, London 1971 and Richard Pomfret, *Diverse Paths of Economic Development*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1992

kebaikannya bagi negara¹⁰. Mereka beranggapan bahwa lebih baik tanpa bantuan, karena bantuan dianggap sebagai salah satu bentuk imperialisme¹¹. Namun kenyataannya mereka tidak menolak semua jenis bantuan. Penolakan mereka terutama ditujukan pada bantuan yang berasal dari negara-negara kapitalis, terutama negara adikuasa yang imperialistis, yaitu Amerika. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa semua bantuan dari negara barat merupakan alat neo-kolonialisme. Bantuan tersebut merintangi pembangunan karena sesungguhnya dimaksudkan untuk mendukung rezim-rezim yang reaksioner, memperkuat golongan elit yang berkuasa, dan karena itu mencegah perubahan kelembagaan yang perlu, mengimpor teknologi yang tidak sesuai dan secara umum mengabadikan hubungan ketergantungan antara “pusat” yang maju dan “pinggiran” yang terbelakang.

Ada dua persoalan berat yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang yang dikelompokkan sebagai negara-negara pengutang besar (*highly indebted countries*) dalam hubungannya dengan pembayaran kewajiban utang luar negeri (pembayaran cicilan plus bunga)¹². Persoalan yang pertama, ialah apa yang disebut sebagai persoalan *net transfer*, yaitu persoalan yang timbul akibat adanya *negative inflow* sumber-sumber keuangan disebabkan cicilan plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang baru yang diterima dari pihak luar negeri. Persoalan kedua yang sedang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang pengutang besar ialah persoalan merosotnya nilai satuan (*unit value*) dan nilai tukar (*term of trade*) produk-produk ekspor dari negara-negara ini ke negara-negara maju.

Fisher¹³ pada tahun 1933 mengemukakan sebuah tulisan yang mencetuskan apa yang kemudian dikenal dalam teori ekonomi internasional sebagai *Fisher Paradox*. Pengertian Fisher Paradox ini dikemukakan oleh Fisher sebagai berikut:

“Each dollar of debt still unpaid becomes bigger dollar and if the over indebtedness with which we started was great enough, the liquidation of debts cannot keep up with the fall of prices, which it causes. In that case, the liquidation defeats itself. While it diminished the number of dollar owed, it may not to do so as fast as it increases the value of each dollar owed. Then, the very effort of individuals to lessen their burden of debts increases it.... Then we have the great paradox: The more the debtors pay, the more they owe”.

Fisher Paradox mengemukakan bahwa negara-negara pengutang besar yang terpaksa melakukan *net transfer* dan berbarengan dengan itu mengalami kemerosotan dalam daya beli penghasilan ekspornya jelas mengalami situasi yang menunjukkan

¹⁰ H.W. Arndt, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Gajahmada University Press, Jogjakarta, 1991

¹¹ Teresa Hayter, *Aid as Imperialism*, Harmondsworth, Penguin, London 1971

¹² Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta, CIDES, 1998.

¹³ I. Fisher, *The Debt -Deflation Theory of Great Depressions*. *Econometrica*, I 1933 dalam Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta, CIDES, 1998

bahwa semakin besar nilai pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang dilakukan negara pengutang, semakin besar nilai utang luar negeri yang menumpuk.

2.3 Keluar dari Jebakan Lingkaran Setan

Indonesia selama ini selalu menempatkan utang sebagai salah satu tiang penyangga pembangunan. Kebijakan anggaran belanja berimbang pemerintah Indonesia selalu menempatkan utang luar negeri sebagai komponen penutup kekurangan. Bahkan saat Indonesia sebenarnya mendapat rejeki berlimpah dari *oil boom*, utang luar negeri tetap saja menjadi komponen utama pemasukan di dalam anggaran belanja pemerintah. Padahal di dalam kebijakan ekonominya pemerintah selalu mengatakan bahwa utang luar negeri hanya menjadi pelengkap belaka.

Didalam prakteknya, selama pemerintahan Orde Baru, utang luar negeri tidak tersalurkan dan diperuntukkan sebagaimana mestinya. Bank Dunia sendiri di dalam laporan internnya, yang sempat bocor ke tangan publik, tatkala Dennis de Tray masih menjabat sebagai Country Director untuk Indonesia, mengatakan bahwa telah terjadi kebocoran dana utang Bank Dunia sebesar 30 persen selama masa pemerintahan Soeharto. Penyimpangan penggunaan dana utang Bank Dunia tersebut mungkin hanya salah satu diantara penyimpangan di masa Soeharto. Sudah bukan rahasia lagi bahwa selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru praktek KKN bukan menjadi barang langka. Berbagai penyimpangan tersebut baru terungkap saat Soeharto lengser dari tahtanya. Ditemukan bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan di banyak lembaga pemerintah, termasuk di bank-bank BUMN, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Ekspor-Impor (Bank Exim).

Sudah menjadi rahasia umum pula dan diberitakan dalam beberapa laporan, yang menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia banyak pula menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat dan kerusakan lingkungan. Contoh yang paling nyata adalah penggundulan hutan yang timbul dalam kerangka *land clearing* bagi lahan transmigrasi. Banyak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia sama sekali tidak mengikutsertakan rakyat didalam perencanaannya. Maka tidaklah heran jika pada masa menjamurnya pembangunan waduk guna irigasi dan proyek pembangkit tenaga listrik, lahan pembangunan yang diambil adalah lahan subur pertanian dan setelah pembangunan selesai masyarakat sama sekali tidak memperoleh keuntungan yang berarti.

Kebocoran yang terjadi didalam proyek-proyek yang dibangun melalui mekanisme pinjaman Bank Dunia pun sudah menjadi rahasia umum dikalangan Bank Dunia sendiri. Bahkan kebocoran tersebut diakui sendiri oleh instansi bersangkutan dalam setiap kesempatan bertemu dengan NGOs. Akan tetapi penyelesaian persoalan tersebut tidaklah sesederhana dengan meminta pengampunan 30% utang yang diduga telah dikorupsi. Korupsi yang dilakukan terhadap proyek-proyek pembangunan yang mendapat utang dari Bank Dunia, atau lembaga donor lainnya tersebut, memang

membuat proyek tidak selesai sesuai dengan ketentuan yang semestinya dan daya tahan proyek yang dibangun pun acap kali kurang dari semestinya. Hal ini bukan saja menimbulkan kerugian waktu, akan tetapi kerusakan-kerusakan yang muncul sesudahnya membuat pemerintah Indonesia perlu meminta utang baru, guna memperbaiki proyek tersebut. Hal tersebut berarti utang baru plus bunga yang semakin membengkak¹⁴.

Persoalan yang lebih mendasar adalah dalam menjalankan proyek-proyek yang dibiayai oleh utang luar negeri, pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat didalam perencanaannya. Bank Dunia sendiri juga menutup mata terhadap pentingnya masukan yang diberikan oleh masyarakat yang akan terkena proyek tersebut, tentang mau atau tidaknya mereka menerima proyek tersebut.

Namun retorika kebocoran ini pun kerap dijadikan Bank Dunia sebagai kambing hitam terhadap kegagalan skema pembangunan yang selama ini mereka tawarkan kepada pemerintah Orde Baru. Secara antusias dalam pertemuan *Consultative Group on Indonesia (CGI)*, yang untuk pertama kali diadakan di Indonesia, Bank Dunia menyiapkan satu makalah dengan judul "*Controlling Corruption in World Bank-Finance Projects*." Dalam makalah yang memang sengaja disiapkan bagi pertemuan CGI tersebut, Bank Dunia menyetengahkan transparansi dan efisiensi sebagai prasyarat bagi proyek-proyek Bank Dunia di masa yang akan datang. Persoalan tak adanya transparansi dan efisiensi, dengan kata lain pemerintahan yang korupsi, dijadikan sebagai penyebab kegagalan pembangunan di masa Orde Baru.

Dengan kata lain Bank Dunia menyetengahkan tentang pentingnya persoalan *Good Governance*. Persoalan kebocoran atau korupsi dibebankan pada tiadanya *good governance* yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Padahal konsep *good governance* ini pun bukannya tiada memiliki kelemahan, yaitu banyak meniru konsep yang sudah mapan diterapkan di negara-negara maju. Konsep *good governance* inilah yang membuat Bank Dunia, ADB, atau IMF memberikan dukungan terhadap munculnya lembaga-lembaga pengawas/anti korupsi, yang mereka anggap akan mendukung upaya mereka menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Adanya utang luar negeri juga membuat pemerintah tidak serius mengumpulkan pendapatan dari dalam negeri. Beberapa kekurangan yang terjadi di dalam penyusunan RAPBN dianggap oleh pemerintah dapat ditutup dari perolehan pinjaman luar negeri. Bahkan di sisi lain ketergantungan ini pun ikut mempengaruhi keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Kebocoran pendapatan negara, akibat korupsi, yang dapat diperoleh dari keuntungan pendapatan BUMN atau BUMD, toh dianggap pemerintah dapat ditutup dari sumber utang luar negeri.

Mungkin suatu gagasan untuk mengkaji ulang komposisi APBN, yang selalu disusun setiap tahun oleh pemerintah dan DPR, cukup menarik untuk disimak.

¹⁴ The World Bank office (Jakarta), "*Controlling Corruption in World Bank-Financed Projects*," paper for Consultative Group for Indonesia meeting, Jakarta, February 1-2, 2000

Revrisond Baswir, Direktur IDEA, Yogyakarta, menuliskan bahwa hampir semua kasus korupsi memiliki simpul didalam salah satu pos APBN. Dalam hitungan yang dibuat oleh Revrisond, jumlah uang yang dikorupsi bahkan bisa menyamai total anggaran yang berjumlah Rp 216 triliun, dalam APBN anggaran 1999/2000. Bahkan jika korupsi atau kebocoran yang terjadi di pos penerimaan dalam negeri dan belanja rutin pembangunan dapat ditanggulangi, maka jumlahnya hampir menyamai pos pemasukan APBN yang berasal dari utang luar negeri yang berjumlah Rp 77 triliun.

Salah satu contoh lain dari kerancuan utang luar negeri adalah program pengentasan kemiskinan yang muncul akibat krisis tahun 1997. Keinginan pemberi pinjaman atau pemerintah untuk memberikan dan menerima utang luar negeri untuk membiayai program kemiskinan dirasakan tidak masuk akal. *Pertama*, pemerintah seolah melepaskan tanggungjawabnya dari persoalan kemiskinan dengan memohon utang pembiayaan untuk program tersebut dari lembaga atau negara donor. Yang *kedua*, diciptakan hubungan ketergantungan kaum miskin terhadap negara. Padahal yang harus dipacu oleh negara adalah kemandirian kaum miskin untuk mengatasi persoalannya. Sementara pemerintah seharusnya hanya memberikan kemudahan usaha, lapangan pekerjaan dan proteksi.

Selama ini program JPS lebih banyak disalurkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang temporer, misalnya pembangunan saluran air, pembersihan sungai, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Padahal dari uang pinjaman yang berjuta-juta dollar tersebut pemerintah sudah dapat membangun beberapa pabrik industri yang dapat menyerap tenaga kerja permanen. Di sisi lain, program jaring pengaman kemiskinan tersebut tanpa disadari ikut menularkan ketergantungan kepada luar negeri kepada rakyat kecil, suatu penyakit yang selama ini secara akut diderita oleh pemerintah.

III. Analisis Data

3.1 Profil Utang Pemerintah dan Swasta

Nilai nominal Surat Utang Negara per 30 September 2004 yang telah diterbitkan pemerintah adalah sebesar Rp 616,00 triliun dan US\$ 1,4 milyar (Tabel 1). Sementara itu posisi utang luar negeri sampai dengan triwulan ke-4 2002 telah mencapai US\$ 74,661 juta. Sedangkan beban utang swasta per triwulan ke-4 2002 mencapai US\$ 131,343 juta (Tabel 2). Berdasarkan RAPBN 2005, total kewajiban pembayaran utang dan bunga pada tahun 2004 mencapai Rp 131,2 triliun yang terdiri dari utang dalam negeri Rp 62,4 triliun dan utang luar negeri Rp 68,8 triliun (data selengkapnya lihat tabel 3, lihat pula lampiran 1 sampai dengan 6 untuk rincian lebih lanjut).

Tabel 1: Profile of Government Debt Securities as of September 25, 2004



GOVERNMENT DEBTS SECURITIES	NOMINAL	
I. Government Domestic Bonds		
1. Fixed Rate ¹⁾	IDR	169.232.329.000.000
2. Variable Rate ¹⁾	IDR	222.017.729.000.000
Sub Total	IDR	391.250.058.000.000
3. Hedge Bonds ²⁾	IDR	5.584.597.000.000
4. Bonds to Bank Indonesia ²⁾	IDR	219.165.594.294.530
Sub Total	IDR	224.750.191.294.530
Total Government Domestic Bonds	IDR	616.000.249.294.530
II Government International Bonds		
1. INDO-06 ¹⁾	USD	400.000.000
2. INDO-14 ¹⁾	USD	1.000.000.000
Total Government International Bonds	USD	1.400.000.000

Notes:

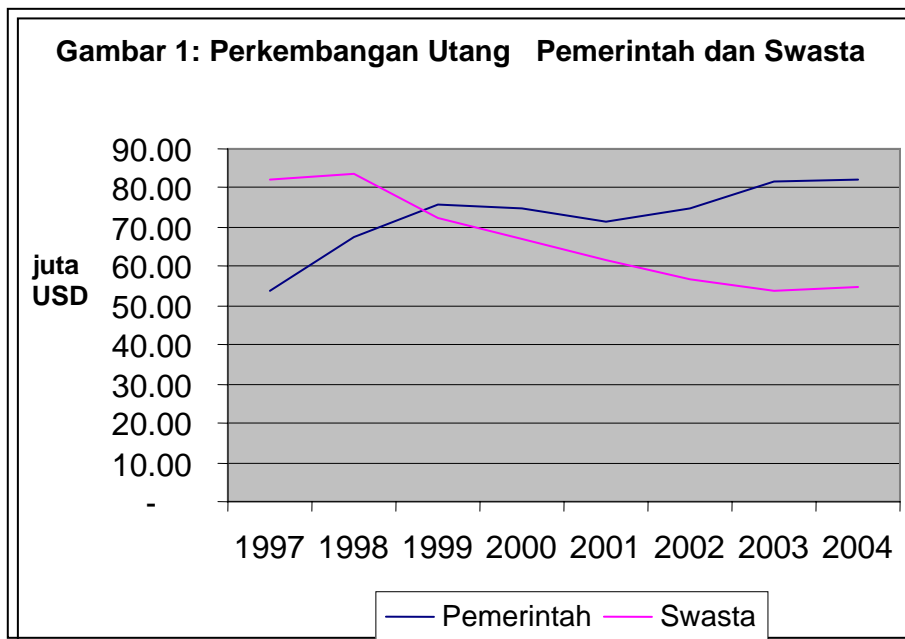
¹⁾ Tradable

²⁾ Non-Tradable

Source: Ministry of Finance

4

Sebagai dampak dari besarnya utang di atas, beban utang yang harus ditanggung cukup berat. Pembayaran utang ini sangat membebani APBN. Untuk menutupi beban ini kebijakan yang ditempuh pemerintah antara lain adalah dengan mengurangi subsidi BBM, menaikkan target penerimaan pajak dan menggenjot privatisasi BUMN.



Sebagai konsekuensi besarnya beban di atas, maka *pertama*, APBN semakin sulit diharapkan menjadi stimulus APBN, karena porsi yang dihabiskan untuk membayar utang terlalu besar. *Kedua*, terjadi penyedotan dana secara besar-besaran dari masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak dan berbagai pungutan lain yang dibarengi dengan pengurangan berbagai subsidi. *Ketiga*, dana masyarakat yang disedot tersebut dialokasikan untuk kreditor di luar negeri (dalam bentuk cicilan pokok dan bunga utang luar negeri) serta kepada para bankir dalam negeri (dalam bentuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap dan surat utang pemerintah). Di satu sisi aliran dana ke luar negeri akan berdampak pada hilangnya sumber dana dan daya kegiatan dari kegiatan ekonomi domestik. Di sisi lain pembayaran utang dalam negeri tidak menghasilkan *multiplier effect* dan keterkaitan sektor (*linkage*) yang tinggi, karena rendahnya *loan to deposit ratio*. *Keempat*, penyedotan dana akan mengurangi *desposable income* masyarakat sehingga permintaan domestik tertekan. Akibatnya pertumbuhan konsumsi dalam negeri sebagai kunci dalam pertumbuhan PDB tidak dapat lagi berperan.

Tabel 2. Posisi Utang Pemerintah dan Swasta

dalam juta USD

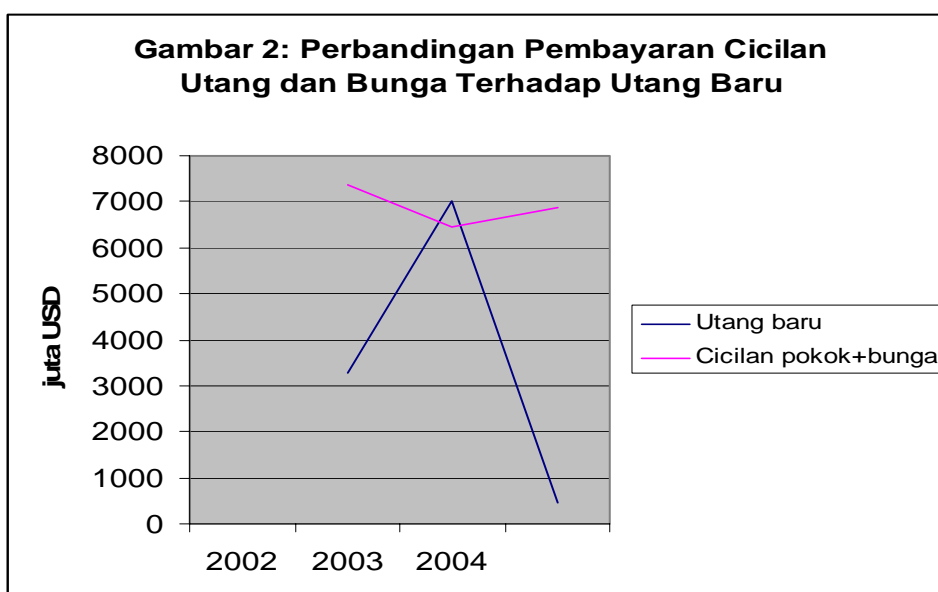
Tahun	Pemerintah	Swasta	Total
1997	53.864	82.223	136.087
1998	67.329	83.557	150.886
1999	75.862	72.236	148.098
2000	74.916	66.777	141.693
2001	71.378	61.696	133.074
2002	74.661	56.682	131.343
2003	81.666	53.735	135.401
2004	82.113	54.567	136.680

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Persoalan terberat yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dewasa ini adalah persoalan utang luar negeri. Persoalan utang luar negeri sangat berbeda dimensinya dengan persoalan utang dalam negeri. Dari segi volume, beban utang luar negeri Indonesia tidak terlalu berbeda dengan beban utang dalam negeri. Dalam hitungan rupiah, volume utang luar negeri dan dalam negeri Indonesia hampir sama besarnya. Persoalannya adalah kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan kedua persoalan itu secara mandiri.

Utang dalam negeri, walaupun bunganya rata-rata dua kali lebih besar dari bunga utang luar negeri, tetapi dapat diselesaikan oleh pemerintah tanpa harus bergantung pada uluran tangan atau kemurahan hati para kreditor internasional. Selain memiliki sumber pendanaan berupa hasil penjualan aset-aset yang diserahkan oleh para konglomerat sebagai pengganti fasilitas penerbitan utang tersebut, persoalan utang dalam negeri juga dapat ditanggulangi oleh pemerintah dengan menunda pembayaran bunganya, atau dengan melakukan penataan ulang masa jatuh temponya (*reprofiling*).

Lain halnya dengan utang luar negeri, walaupun bunganya lebih rendah dari beban bunga utang dalam negeri, tetapi untuk membayar pokok dan bunganya, tidak dapat tidak, pemerintah harus berurusan dengan para kreditur internasional. Pendanaan untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri, misalnya, harus diperoleh dengan menguras cadangan devisa atau dengan membuat utang luar negeri baru.



Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 pemerintah Indonesia sudah masuk dalam perangkap *Fisher Paradox*. Pertambahan utang luar negeri pada tahun 2002 mencapai USD 3.283 juta, sementara pembayaran bunga dan cicilan pokok mencapai USD 7.374 juta. Praktis utang baru yang didapat pemerintah dalam tahun tersebut tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman dan cicilan pokok. Pada tahun 2003 kondisi berbalik kembali. Nilai utang luar negeri baru yang didapat pemerintah mencapai USD 7.004,62 juta, sementara itu pembayaran bunga utang dan cicilan pokok mencapai USD 6.451 juta. Kondisi ini menggambarkan bahwa Indonesia sudah masuk perangkap gali lubang tutup lubang. Utang luar negeri sulit diharapkan dapat berperan dalam pembiayaan pembangunan, karena habis tersedot kembali untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman.

Peranan utang luar negeri dalam pembiayaan APBN dewasa ini masih cukup besar yakni mencapai 39,4% pada tahun 2002 dan pada tahun 2004 terus diusahakan turun menjadi 31,4%. Permasalahan utang luar negeri dalam demonitisasi yen semakin menyulitkan posisi Indonesia dengan semakin menguatnya yen terhadap dollar AS. Disamping itu penggunaan utang luar negeri semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan presentasi utang luar negeri pemerintah yang juga semakin

meningkat¹⁵. Dalam jangka panjang Indonesia juga akan semakin sulit melepaskan diri dari utang karena terus memperoleh utang baru. Untuk itu perlu segera dicari jalan keluarnya.

Tabel 3 Posisi Pengeluaran Pemerintah untuk Pembayaran Utang dan Bunga

Rincian	Triliun rupiah		
	2002	2003	2004
A. Utang Dalam Negeri			
Pokok	3,9	14,4	21,1
Bunga	62,3	46,4	41,3
Total	66,2	60,8	62,4
B. Utang Luar Negeri			
Pokok	12,3	16,3	44,4
Bunga	25,4	22,5	24,4
Total	37,7	38,8	68,8

Sumber: RAPBN 2005, diolah

3.2 Pemulihan Ekonomi

Beberapa studi menunjukkan bahwa kontribusi utang terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi negatif apabila rasio utang terhadap PDB telah melampaui 50 persen. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila negara-negara berkembang banyak yang memakai standar rasio utang terhadap PDB di atas 60 persen sebagai lampu kuning¹⁶. Untuk itu pemerintah Indonesia juga memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk membawa rasio utang terhadap PDB tersebut menjadi di bawah 50 persen pada akhir 2006, mengingat institusi-institusi Indonesia sebagai negara berkembang belum sekuat negara maju.

Tingkat akumulasi utang yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin besar akumulasi utang suatu negara, maka akan semakin menurunkan kemampuan membayar kembali utang tersebut. Utang memang diperlukan pada tingkat yang wajar dan penambahan utang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada suatu titik atau limit tertentu. Pada kondisi inilah utang merupakan kebutuhan normal setiap negara. Namun, pada saat stok utang telah melebihi limit tersebut, penambahan utang mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

¹⁵ Kebutuhan utang dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat. Dengan adanya musibah badai tsunami, Indonesia setidaknya-tidaknya membutuhkan dana sebesar USD 1,5 - 2 milyar atau Rp 13,5 - 18 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara pasca tsunami. Sementara itu pemerintah dewasa ini menghadapi keleluasaan anggaran yang sangat minim bahkan hampir tidak ada, karena adanya kewajiban pemerintah membayar cicilan utang dan bunga utang untuk tahun anggaran 2005 yang besar, yakni kurang lebih dianggarkan sebesar USD 7,99 milyar atau Rp 71,9 triliun (*Koran Tempo*, 11 Januari 2004).

¹⁶ Dian Ediana Rae dan Sari Nadia Z. Rizal, Dilema Pinjaman Luar Negeri, dalam *Kompas*, 13 Mei 2004

Dalam kasus Indonesia, hasil penelitian Sritua Arief menunjukkan bahwa pada periode 1995-1996 utang luar negeri ternyata membawa dampak negatif. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi tidak stabil¹⁷. Hasil penelitian Makmun Syadullah¹⁸ yang menggunakan pendekatan *net margin* sebagaimana yang dilakukan oleh Sritua Arif menunjukkan bahwa dalam tahun 1996 ternyata utang luar negeri membawa dampak positif terhadap perekonomian. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada tahun 1996 perekonomian Indonesia jauh lebih baik yang tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,88% dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap USD.

Sejak dilanda krisis pada pertengahan 1997, utang luar negeri diperkirakan akan membawa beban negatif terhadap perekonomian. Perkiraan didasarkan fakta bahwa utang luar negeri Indonesia dewasa ini terus membengkak. Dengan semakin bertambahnya akumulasi utang, pertumbuhan PDB dan investasi mulai menurun. Dalam kasus Indonesia, pola bertambahnya akumulasi utang dimulai sejak maraknya semangat liberalisasi dan deregulasi sekitar tahun 1988 dan peniadaan *platform* utang sebagai pelengkap dalam GBHN. Artinya, utang sejak saat itu bukan lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi malahan sebagai sumber utama. Kondisi ini semakin diperparah dengan terus meningkatnya jumlah utang luar negeri tanpa diiringi oleh kebijakan utang yang hati-hati (*prudent borrowing policy*), khususnya pada utang swasta. Dengan demikian, utang tidak akan mampu mendorong investasi dan pertumbuhan PDB, tetapi sebaliknya telah menyebabkan kondisi krisis utang di Indonesia.

Terdapat dua alternatif untuk menghadapi kondisi utang negara yang sudah memprihatinkan di atas, yaitu *pertama*, pengembangan pasar obligasi pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan perlunya dikembangkan pasar obligasi pemerintah,

- (1) untuk membangun struktur utang pemerintah yang berkesinambungan. Pasar sekunder yang berkembang akan mendukung upaya pemerintah untuk merefinancing utang-utangnya secara *sustainable* sehingga utang domestik pemerintah pada masa yang akan datang dengan lebih seimbang jatuh temponya.
- (2) untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Pengembangan pasar obligasi pemerintah akan memberikan alternatif yang lebih fleksible dalam mengkombinasikan utang domestik dan utang luar negeri dengan beban biaya yang paling rendah (minimum). Disamping itu obligasi yang likuid juga akan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dengan mengandalkan mobilisasi dana dari sumber domestik.

¹⁷ Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, CIDES, 1998

¹⁸ Makmun Syadullah, *Kaitan Hutang Luar Negeri Dengan Beban Ekonomi*, dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Biro Pengkajian Rkonomi dan Keuangan, BAKM-Depkeu, Edisi Juni 1999.

- (3) mendukung efektivitas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter. Sebagai instrumen operasi pasar terbuka (OPT), Bank Indonesia selama ini hanya menggunakan SBI, karena belum adanya *government securities*. Padahal di beberapa negara, bank sentral telah menggunakan obligasi pemerintah sebagai instrumen OPT. Sebagai prasyarat instrumen OPT, obligasi ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup, kesinambungan penerbitannya, likuid. Disamping itu juga perlu adanya koordinasi otoritas fiskal dan moneter agar *price stability* terjamin, *fiskal sustainable* tidak terancam, dan *market principles* tetap dapat berfungsi independen.

Beberapa persyaratan yang diperlukan agar pasar obligasi dapat berkembang khususnya di pasar sekunder antara lain adalah: a), *credit worthiness* penerbit (pemerintah) khususnya dimata investor asing. b) adanya perangkat hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan investor. c) basis investor yang luas (dari *wholesale* sampai dengan *retail*). d) adanya sistem perpajakan yang memadai. e) adanya lembaga perantara yang memadai, dan f) adanya dukungan system pembayaran yang efisien, aman dan cepat.

IV. Penutup

4.1 Simpulan

Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, posisi utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta pada triwulan keempat 2002 telah menunjukkan angka yang cukup besar, yakni mencapai US\$ 131,343 juta. Sementara SUN yang dikeluarkan oleh pemerintah per September 2004 telah mencapai Rp 616 triliun dan obligasi Internasional mencapai US\$ 1,4 milyar. Berdasarkan RAPBN 2004, total kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai 31,4% dari total pengeluaran APBN. *Kedua*, berkaitan dengan besarnya utang pemerintah, pembayaran utang ini sangat membebani APBN. Untuk menutupi beban ini kebijakan yang telah ditempuh pemerintah beberapa tahun belakangan ini adalah mengurangi subsidi BBM, menaikkan target penerimaan pajak, menaikkan tarif listrik, telepon dan menggenjot privatisasi BUMN.

4.2 Saran

Sebagai salah satu alternatif untuk menghadapi kondisi utang negara yang sudah memprihatinkan di atas, yaitu pengembangan pasar obligasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk membangun struktur utang pemerintah yang berkesinambungan, untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri dan mendukung efektivitas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mengembangkan pasar obligasi pemerintah ini, persyaratan yang diperlukan a) *credit worthiness* penerbit, b) adanya perangkat hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan investor, c) basis investor yang luas, d) adanya system perpajakan yang memadai, e) adanya

lembaga perantara yang memadai, dan f) adanya dukungan system pembayaran yang efisien, aman dan cepat.

V. Daftar Pustaka

- Andi Irawan, "Utang Luar Negeri Pascatsunami", dalam Koran tempo, 11 Januari 2005.
- Boediono, "Teori Pertumbuhan Ekonomi", BPFE Yogyakarta, 1982
- Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta, CIDES, 1988
- Cindy M. Buhl, "Panduan Untuk Masyarakat Umum Tentang Bank Pembangunan Multilateral dan Masyarakat Adat Lokal: Bank Dunia", The Bank Information Center (BIC), Washington, 1995..
- Dian Ediana Rae dan Sari Nadia Z. Rizal, "Dilema Pinjaman Luar Negeri", dalam Kompas, 13 Mei 2004
- Gerald M. Meier, "International Trade and Development", A Harper International Student reprint, Harper and Row New York, 1965.
- Goldstein, "International Capital Market: Development, Prospect, and Policy Issues," IMF, 1994.
- H.W. Arndt, "Perkembangan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga", Gajahmada University Press, 1991.
- I. Fisher, "The Debt - Deflation Theory of Great Depressions". *Econometrica*, 1993 dalam Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta, CIDES, 1998
- Manfaat Utang Luar Negeri Dipertanyakan*, Kompas, 29 Maret 1995.
- Makmun Syadullah, "Kaitan Hutang Luar Negeri Dengan Beban Ekonomi", dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan, Biro Pengkajian ekonomi dan Keuangan, BAF-Depkeu, Edisi Juni 1999.
- Mikhail Gorbachev, "Perestroika: Gagasan Baru Untuk Negara Kami dan Dunia", PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987.
- Michael P. Todaro, "Economic and Development in the Third World", Longman Inc, New York, 1983.
- Miranda S. Goeltom, "Pengembangan Pasar Obligasi Pemerintah", dalam Majalah Bank dan Manajemen edisi Maret-April. 2002.
- M. Suparmoko, "Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara", Bagian Penerbit Fak. Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1980.
- M.I. Volkov (ed.), "A Dictionary of Political Economy", Progress Publishers, Moscow, 1985.
- Nicola Bullard, Walden Bello, dan Kamal Malhotra, "Menjinakkan Macan-Macan Asia: IMF dan Krisis Asia," Occasional Paper, Infid, Jakarta, 1999.
- Oded Liviatan, "A Macro-Absorption Approach for Estimating the Development and Cultural Change", 1984.
- Richard Pomfret, "Diverse Paths of Economic Development", New York: Harvester Wheatsheaf, 1992.
- Sritua Arief, "Teori dan Kebijakan Pembangunan", CIDES, 1998

Suryadi A. Radjab, *"Rakyat Miskin dan Logika Pemiskinan, dalam Demokrasi: Antara Represi dan Resistensi"*, Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, YLBH, Jakarta, 1993.

Teresa Hayter, *"Aid as Imperialism"*, Harmondsworth, Penguin, London 1971

The World Bank office (Jakarta), *"Controlling Corruption in World Bank-Financed Projects,"* paper for Consultative Group for Indonesia meeting, Jakarta, February 1-2, 2000

Umar Juoro, *"Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pinjaman Luar Negeri"*, dalam kuliah umum di FE-UI, di Depok, 28 Maret 1995.

Lampiran 1

EXTERNAL DEBT OUTSTANDING
(Millions of USD)

End of Period	Pemerintah	Swasta/Private		Bukan lembaga Keuangan <i>Non-Financial Institution</i>	Sub Jumlah Sub Total	Jumlah Total
	Government	Lembaga Keuangan <i>Financial Institutions</i>				
		Bank Bank	Bukan Bank Non-Bank			
1997	53,864	14,364	3,415	64,444	82,223	136,087
1998	67,329	10,810	2,067	70,680	83,557	150,886
1999	75,862	10,849	1,035	60,352	72,236	148,098
2000	74,916	7,720	1,150	57,907	66,777	141,693
2001						
Trw.I	72,336	7,849	1,064	57,630	66,543	138,879
Trw.II	72,495	7,684	1,214	57,454	66,352	138,847
Trw.III	75,184	6,564	1,084	54,945	62,593	137,777
Trw.IV	71,378	6,649	1,064	53,983	61,696	133,074
2002						
Trw.I	71,678	6,308	2,426	51,144	59,878	131,556
Trw.II	74,158	5,848	2,524	49,607	57,979	132,137
Trw.III	73,464	5,163	2,857	49,805	57,825	131,289
Trw.IV	74,661	4,870	2,772	49,040	56,682	131,343

Source: Bank Indonesia

Lampiran 2

**OUTSTANDING OF GOVERNMENT EXTERNAL DEBT BY TERMS OF CREDIT
(Millions USD)**

End of Period	Komersial 1)	Bukan Komersial		Sub Jumlah Sub Total	Jumlah Total
	Commercial	O D A	NON ODA		
1997	890	38,162	14,812	52,974	53,864
1998	2,388	48,422	16,519	64,941	67,329
1999	2,530	56,451	16,881	73,332	75,862
2000	2,420	56,154	16,342	72,496	74,916
2001					
Trw.I	2,354	53,757	16,225	69,982	72,336
Trw.II	3,820	53,099	15,576	68,675	72,495
Trw.III	4,441	54,882	15,861	70,743	75,184
Trw.IV	4,304	51,747	15,327	67,074	71,378
2002					
Trw.I	4,442	51,708	15,528	67,236	71,678
Trw.II	2,739	54,849	16,570	71,419	74,158
Trw.III	2,800	53,998	16,666	70,664	73,464
Trw.IV	2,501	55,186	16,974	72,160	74,661

Source: Bank Indonesia.

1) Including domestic securities owned by non resident.

Lampiran 3

EXTERNAL DEBT REPAYMENT
(Millions of USD)

Akhir Periode	<i>Private</i>										
	Pemerintah		Lembaga Keuangan/ <i>Financial Institution</i>								Jumlah Total
	<i>Government</i>		Bank				Bukan Lembaga Keuangan <i>NonFinancial Institution</i>				
	Pokok <i>Principal</i>	Bunga <i>Interest</i>	Pokok <i>Principal</i>	Bunga <i>Interest</i>	Pokok <i>Principal</i>	Bunga <i>Interest</i>	Pokok <i>Principal</i>	Bunga <i>Interest</i>	Pokok <i>Principal</i>	Bunga <i>Interest</i>	Sub Jumlah Sub Total
1997	4,712	2,561	2,497	822	1,028	194	8,217	3,847	12,064	23,878	
1998	3,204	2,701	2,934	490	1,666	227	10,463	4,001	14,464	25,686	
1999	2,580	3,220	4,198	1,114	1,897	219	18,682	4,821	23,503	36,731	
2000	1,769	3,544	3,230	522	956	99	15,140	3,914	19,054	29,174	
2001											
Trw.I	818	864	501	30	186	17	1,598	714	2,312	4,728	
Trw.II	648	828	566	88	95	15	2,177	771	2,948	5,188	
Trw.III	972	718	1,664	138	176	13	2,852	430	3,282	6,963	
Trw.IV	1,181	1,019	978	158	104	14	1,694	579	2,273	5,727	
2002											
Trw.I	1,135	686	960	17	175	11	1,494	236	1,730	4,714	
Trw.II	1,344	598	1,127	144	175	7	2,087	218	2,305	5,700	
Trw.III	1,052	492	1,400	111	147	7	1,717	305	2,022	5,231	
Trw.IV	477	207	79	78	168	2	170	730	326	2,067	

Source: Bank Indonesia

Lampiran 4

OUTSTANDING OF GOVERNMENT EXTERNAL DEBT BY MAJOR CURRENCIES
(Millions USD)

End of Period	DEM	EUR	FRF	GBP	JPY	S DR	USD 1)	Others	Total
1997	2,653	-	1,847	1,022	18,581	3,053	23,066	3,642	53,864
1998	3,104	-	2,046	1,048	22,251	9,187	25,342	4,351	67,329
1999	2,425	-	1,752	1,206	27,428	10,352	28,570	4,129	75,862
2000	2,018	1,521	1,303	1,154	25,038	11,134	29,530	3,218	74,916
2001									
Trw.I	1,769	1,815	1,299	1,122	23,715	10,359	29,269	2,988	72,336
Trw.II	1,600	1,900	1,138	1,106	23,339	9,858	30,746	2,808	72,495
Trw.III	1,750	2,150	1,282	1,174	24,403	10,127	31,304	2,994	75,184
Trw.IV	-	7,027	- 1,158	22,162	9,283	30,939	809	71,378	
2002									
Trw.I	-	7,272	- 1,143	22,225	8,998	31,205	835	71,678	
Trw.II	-	8,037	- 1,225	24,440	9,675	29,881	900	74,158	
Trw.III	-	8,051	- 1,273	24,321	9,074	29,840	905	73,464	
Trw.IV	-	8,624	- 1,312	24,981	9,105	29,127	1,511	74,660	

Source: Bank Indonesia.

1) Including domestic securities owned by non resident.

Lampiran 5

OUTSTANDING OF ODA GOVERNMENT EXTERNAL DEBT BY CREDITOR
(Millions USD)

Country	1997	1998	1999	2000	2001				2002			
					Qrt.1	Qrt.2	Qrt.3	Qrt.4	Qrt.1	Qrt.2	Qrt.3	Qrt.4
Bilateral	19,517	22,374	26,158	24,646	23,342	23,221	24,738	22,718	22,921	25,194	25,143	26,074
United States	1,477	1,445	1,485	1,546	1,546	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,567	1,584
Austria	211	273	763	803	776	752	823	796	841	910	890	864
Belanda	792	787	711	727	674	647	698	667	679	748	750	791
Belgia	80	122	106	98	93	89	97	93	95	105	104	113
Denmark	17	17	16	15	17	13	15	15	14	16	16	17
Inggris	1	352	362	341	329	325	344	341	336	356	354	356
Italia	179	177	169	167	165	164	166	165	166	169	170	173
Jepang	13,360	5,775	19,452	18,144	16,912	17,008	17,770	16,269	16,330	18,179	18,128	18,902
Jerman	1,025	1,099	930	861	883	848	943	911	944	1,061	1,063	1,083
Kanada	154	140	149	144	138	142	137	136	136	143	137	137
Perancis	1,560	1,656	1,465	1,227	1,226	1,104	1,556	1,142	1,170	1,291	1,284	1,377
Swiss	29	29	25	25	23	22	25	24	24	27	27	37
Finlandia	149	-	-	6	6	6	6	6	6	7	7	7
Spanyol	262	281	296	314	319	319	368	367	375	376	380	382
Korea Selatan	-	19	49	52	58	59	65	65	66	66	73	76
Kuwait	41	41	41	41	40	39	43	40	61	62	63	43
Saudi Arabia	38	51	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Negara Lainnya	142	110	93	89	91	91	89	88	85	85	84	86
Multilateral	18,645	26,048	30,293	31,508	30,415	29,878	30,144	29,029	28,787	29,655	28,855	29,112
ADB	4,557	5,694	7,517	7,544	7,293	7,321	7,443	7,179	7,473	7,793	7,962	8,310
IDA	720	702	682	719	736	730	730	726	741	746	762	788

Pengelolaan Utang Negara dan Pemulihan Ekonomi

Makmun

IBRD	10,307	10,229	11,494	11,774	11,693	11,659	11,545	11,577	11,335	11,236	10,902	10,802
IDB	27	32	51	215	239	220	219	184	184	170	145	138
NIB	-	217	214	200	196	192	189	186	182	178	174	170
IFAD	57	84	72	65	61	58	61	57	64	65	64	65
IMF	2,973	9,082	10,255	10,983	10,189	9,690	9,950	9,105	8,793	9,455	8,834	8,829
EIB	4	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
MIGA	-	-	-	-	-	-	-	8	8	5	5	3
Total:	38,162	48,422	56,451	56,154	53,757	53,099	54,882	51,747	51,708	54,849	53,998	55,186

Source: Bank Indonesia.

Lampiran 6

PLEDGES FOR GOVERNMENT EXTERNAL DEBT OF CGI MEETING BY CREDITOR
(Millions of USD)

----- Consultative Group for Indonesia (CGI) -----							
Country	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000	2001	2002

Bilateral	2,563.6	2,262.7	2,305.0	1,633.7	2,006.0	2,339.7	971.0
United States	84.7	74.0	250.0	184.5	145.0	280.0	-
Australia	50.5	54.5	75.0	78.0	59.0	64.7	-
Austria	23.5	19.9	20.0	20.0	15.0	20.0	15.0
Belanda	-	-	-	-	-	-	60.0
Belgia	16.0	-	6.0	-	-	-	6.4
Denmark	3.2	-	9.0	10.7	5.0	7.0	-
Inggris	20.0	16.0	46.0	38.5	33.0	15.3	-
Italia	6.5	-	5.0	10.0	1.0	-	10.0
Jepang	1,916.7	1,869.1	1,500.0	1,200.0	1,560.0	1,794.0	720.0
Jerman	208.3	66.3	300.0	39.7	102.0	54.8	78.7
Kanada	20.5	19.0	25.0	19.6	11.0	4.7	-
Perancis	100.0	-	-	-	-	-	-
Selandia Baru	3.4	3.4	3.0	2.7	3.0	2.1	-
Swiss	8.0	5.4	1.0	4.1	4.0	1.0	-
Finlandia	1.1	-	-	1.0	-	-	-
Spanyol	62.5	62.5	25.0	10.0	59.0	73.0	57.0
Korea Selatan	38.7	72.6	30.0	9.2	9.0	23.1	23.0
Norwegia	-	-	10.0	5.7	-	-	-
Kuwait	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	-	-	-	-	-	-	0.9

Multilateral	2,696.7	3,036.6	5,589.0	4,224.0	2,721.0	3,034.3	2,169.7
A D B	1,200.0	1,200.0	2,200.0	1,600.0	1,065.0	1,515.0	1,150.0
I D A	-	-	-	-	-	-	-
I B R D	1,200.0	1,500.0	2,700.0	2,384.0	1,500.0	1,300.0	1,000.0
I D B	100.0	100.0	400.0	50.0	-	20.0	-
N I B	50.0	40.0	30.0	10.0	-	19.9	19.7
I F A D	20.0	25.0	25.0	10.0	-	-	-
Badan PBB	36.6	37.8	144.0	107.0	106.0	146.8	-
U N I C E F	15.1	13.8	-	-	-	-	-
UE (Uni Eropa)	-	-	-	-	40.0	-	-
E I B	50.0	100.0	40.0	63.0	10.0	26.2	-
Kuwait Fund	25.0	-	25.0	-	-	-	-
Saudi Fund	-	20.0	25.0	-	-	6.4	-

Source: Bank Indonesia